

Laporan Kinerja  
KPKNL MALANG

Menuju Stabilitas Ekonomi  
Tetap Optimis & Waspada

2022



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah* *robbil 'alamin*, segala puji kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan waktu dan kesehatan, dimana sepanjang tahun 2022 kita menghadapi tantangan berat, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namun seluruh jajaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang masih diberikan kesempatan memberikan karya terbaik atas capaian kinerjanya sekaligus masih diberikan kepercayaan meraih berbagai penghargaan.

Laporan ini disusun sebagai salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. KPKNL Malang sebagai Instansi Vertikal DJKN telah menyusun LAKIN yang berisi berbagai capaian kinerja sebagai hasil pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022.

Performance KPKNL Malang dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja KPKNL Malang dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun 2022. Pengukuran kinerja Tahun 2022 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022 diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu Three KPKNL Malang Tahun 2022 sebesar 113,00%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja KPKNL Malang sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Malang Tahun 2022.

Di samping itu, melalui LAKIN yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Malang untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. LAKIN KPKNL Malang Tahun 2022 diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai KPKNL Malang untuk

memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang.

Sebagai simpulan atas semua hal tersebut, kami yakin meski tantangan ke depan semakin beragam dan sulit terprediksi, namun dengan semangat, sinergi, dan disiplin tinggi, KPKNL Malang akan menjadi lebih baik sejalan dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Keseluruhan pencapaian tentu saja tidak lepas dari arahan Pimpinan, peran seluruh pegawai dan pemangku kepentingan, dimana kata syukur dan terimakasih tidak dapat mewakili andil tersebut, semoga Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* dapat memberikan balasan yang lebih baik dan keberkahan atas segala upaya yang telah tercurah selama ini.

Salam MBOIS,

Ditandatangani secara elektronik  
Ridho Wahyono

# Daftar Isi



## Pendahuluan

Latar Belakang	3
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
Peran Strategis KPKNL Malang	8
Sistematika Laporan	11



## Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis	15
Penetapan Kinerja	17



## **Akuntabilitas Kinerja**

Capaian Kinerja Organisasi	<b>25</b>
Analisis dan Evaluasi Kinerja	<b>28</b>



## **Penutup**

**47**



# BAB I | Pendahuluan



- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis KPKNL Malang
- D. Sistematika Pelaporan

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia



# BAB I | Pendahuluan

## A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Malang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Malang dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2022. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur. KPKNL Malang beralamat di Jalan S. Supriadi Nomor 157, Kec. Sukun, Kota Malang, Kode Pos 65148.

KPKNL Malang mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Subbagian Umum;
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN);
3. Seksi Piutang Negara;
4. Seksi Hukum dan Informasi (HI);
5. Seksi Kepatuhan Internal (KI); dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Subbagian Umum**

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.

### **Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara**

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara.

### **Seksi Piutang Negara**

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

### **Seksi Hukum dan Informasi**

mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

### **Seksi Kepatuhan Internal**

mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Jabatan Fungsional Pelelang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah.
2. Jabatan Fungsional Penilai mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/ atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Pelayanan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi, penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan PH dan atau Penjamin Hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang Negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang Negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lainnya;

Struktur organisasi KPKNL Malang dapat dilihat pada Bagan Organisasi di bawah ini:

### Bagan I

#### BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG



Sumber: website DJKN (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/2926/Struktur-Organisasi-DJKN.html>)

10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang Negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang Negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL Malang.

Wilayah kerja KPKNL Malang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, meliputi:

1. Kota Malang;
2. Kabupaten Malang;
3. Kota Batu;
4. Kota Kediri;
5. Kabupaten Kediri;
6. Kota Blitar;
7. Kabupaten Blitar;
8. Kabupaten Jombang;
9. Kabupaten Tulungagung;
10. Kabupaten Trenggalek.

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Malang didukung oleh 48 (empat puluh delapan) orang pegawai, dengan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan, Golongan, dan Jenis Kelamin (data per 31 Desember 2022)

No.	Unit Kerja	Jmlh Peg.	Jenis Kelamin		Jabatan				Golongan		
			L	P	III	IV	Fungsional	Staf	IV	III	II
1	Kepala Kantor	1	1		1				1		
2	Subbagian Umum	15	12	3		1		14		11	4
3	Seksi PKN	8	4	4		1		7	1	7	
4	Seksi Piutang Negara	5	3	2		1		4		5	
5	Seksi Hukum & Informasi	6	3	3		1		5		5	1
6	Seksi Kepatuhan Internal	5	2	3		1		4		3	2
7	Kelompok Jabatan Fungsional	8	6	2			8		1	6	1
	Jumlah	48	31	17	1	5	8	34	3	37	8

2. Berdasarkan tingkat pendidikan (data per 31 Desember 2022)

No.	Unit Kerja	Jmlh Peg.	Tingkat Pendidikan							
			S3	S2	S1/D4	D3	D1	SMA	SMP	SD
1	Kepala Kantor	1		1						
2	Subbagian Umum	15			5	6		4		
3	Seksi PKN	8		1	2	4		1		
4	Seksi Piutang Negara	5			2		2	1		
5	Seksi Hukum & Informasi	6		1	4	1				
6	Seksi Kepatuhan Internal	5			1	3	1			
7	Kelompok Jabatan Fungsional	8		3	5					
	Jumlah	48		6	19	14	3	6		

3. Jabatan Fungsional dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Pelelang : 4 orang
- b. Penilai Pemerintah : 3 orang
- c. Pranatalaksana Barang : -
- d. Pranata Keuangan APBN : 1 orang

### C. PERAN STRATEGIS KPKNL MALANG

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang, KPKNL Malang memiliki peran strategis sebagai berikut:

#### 1. Melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai Pengelola Barang Milik Negara, KPKNL Malang memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan antara lain:

- a. optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara terutama dalam utilisasi kekayaan negara;
- b. optimalisasi aset-aset yang terindikasi idle dan pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi dan hukum; dan
- c. berperan penting terhadap upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam setiap tahapan pengelolaan Barang Milik Negara, dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, KPKNL Malang senantiasa menekankan pada pentingnya membangun kerja sama yang lebih baik antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara.

Membangun dan meningkatkan kemampuan (*capacity building*) dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada tataran Kuasa Pengguna Barang akan sangat berpengaruh terhadap

keberhasilan pengelolaan Barang Milik Negara sehingga sinergi antara Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang menjadi sangat penting dan senantiasa ditingkatkan oleh KPKNL Malang dalam rangka pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan akuntabel, meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pengelolaan Barang Milik Negara, serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang akuntabel.

#### Pengukuran Penggunaan BMN sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan

Salah satu bentuk pengelolaan BMN yang baik adalah penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang efektif dan efisien. Salah satu tools pengukuran tingkat keefektifan dan efisiensi penggunaan BMN adalah menggunakan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK). Pelaksanaan pengukuran penggunaan BMN sesuai SBSK berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

#### Sertifikasi BMN berupa Tanah

Dalam rangka mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Tertib Fisik, dan Tertib Hukum) BMN berupa tanah, salah satu upaya yang dilakukan adalah sertifikasi terhadap BMN berupa tanah yang belum bersertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah RI cq Kementerian/Lembaga. Dalam pelaksanaan program ini KPKNL bekerjasama dengan Kantor Pertanahan di wilayah kerja dengan dukungan Satuan Kerja untuk proses penerbitan sertipikat hak pakai.

### Utilisasi Aset

Dalam pengelolaan BMN, hal yang paling utama adalah memastikan bahwa aset yang dikelola telah terutilisasi sesuai peruntukannya. Peran Pengelola sangat vital dalam memberikan penetapan status penggunaan BMN sebagai dasar Kuasa Pengguna Barang menggunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya.

### Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Salah satu perubahan mendasar pada sektor pengelolaan aset Negara adalah pergeseran pola pikir dan sudut pandang. Jika sebelumnya BMN cenderung dipandang dan diperlakukan sebagai suatu beban (*cost center*), kini menjadi suatu investasi yang strategis dalam menunjang terlaksananya fungsi pemerintahan sekaligus sebagai salah satu faktor sumber penerimaan pendapatan (*revenue center*).

Portofolio BMN yang sangat besar tentu harus dikelola dan diukur kinerjanya dengan baik dan optimal. Dengan adanya pengukuran kinerja aset ini diharapkan dapat merubah paradigma Pengelola BMN dari *asset administrator* menjadi *asset manager*. Evaluasi kinerja aset dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk mengukur/mengetahui kinerja BMN, untuk selanjutnya dibuat langkah strategis dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi pengelolaan BMN.

## **2. Optimalisasi Penataan Aset Menuju Revenue Center**

Penerimaan negara bukan pajak menjadi alternatif dalam menyokong APBN selain penerimaan dari sektor perpajakan. Melalui pengelolaan BMN, KPKNL sebagai pengelola dapat mengoptimalkan

penggunaan/pemanfaatan aset sehingga mengubah paradigma *cost center* menjadi *revenue center*.

## **3. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara**

Melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163/KMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, Piutang Negara dengan nilai sampai dengan Rp8.000.000,00 tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163/KMK.06/2020 dan KPKNL melaksanakan pengurusan piutang negara dengan nilai penyerahan diatas Rp8.000.000,00.

Selanjutnya, KPKNL Malang juga melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah yang

Diurus / Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2022.

#### 4. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Malang secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi, sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik/dokumen negara.

Risalah Lelang berfungsi sebagai Akta Jual Beli (*acte van transport*) untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Malang diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah kerjanya.

Selanjutnya, pada tahun 2022, KPKNL Malang juga melaksanakan kegiatan Kompetisi dan Inovasi Lelang Sukarela Produk UMKM (KEDAI Lelang UMKM) Tahun 2022. KEDAI Lelang UMKM ini diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan

kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

2. Mendorong ide-ide kreatif, inovatif serta solutif yang dapat langsung diimplementasikan guna mewujudkan lelang sebagai instrumen jual beli bagi masyarakat.
3. Memasyarakatkan lelang sukarela dengan mengenakan lebih baik lagi kepada masyarakat penyelenggara lelang, baik KPKNL maupun Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.
4. Mengeksplorasi produk UMKM di wilayah kerja kantor penyelenggara lelang dan meningkatkan kerja sama dengan pengusaha UMKM, sebagai upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

#### 5. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara

Dalam pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Malang memperoleh PNBP berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara.

Sedangkan dalam pelayanan lelang, KPKNL Malang memperoleh bea lelang (bea permohonan lelang, bea lelang pembeli dan/atau bea lelang penjual, bea lelang batal, serta bea lelang pegadaian) termasuk Uang Jaminan Lelang dari Pembeli Wanprestasi yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selain itu, dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Malang juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Penerimaan Negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pemberian persetujuan pemanfaatan aset (sewa) atau persetujuan pemindahtanganan/penjualan.

## D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja **KPKNL Malang** Tahun 2022 menggunakan Sistematika Laporan sebagai berikut:

### 1. Kata Pengantar

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

### 2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi, dan struktur organisasi dan peran strategis instansi KPKNL Malang serta sistematika laporan.

### 3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.

### 4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran KPKNL Malang tahun 2022.

### 5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Malang Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Malang di tahun yang akan datang.

Sebagai pedoman dan motivasi bagi pegawai, KPKNL Malang membuat *Motto* yaitu **MBOIS** (**M**aju untuk memberikan layanan terbaik, **B**onafive dengan layanan yang terpercaya, dan **I**stimewa bagi seluruh pengguna layanan).



## BAB II | Perencanaan Kinerja



A. Rencana Strategis

B. Penetapan Kinerja

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia

## **BAB II** | Perencanaan Kinerja

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan Negara.

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024, serta untuk mewujudkan Visi DJKN, Visi Kementerian Keuangan, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden, KPKNL Malang berpartisipasi aktif mendukung tercapainya Tujuan, Strategi, dan Sasaran Strategis sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, yaitu:

#### **Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta Roadmap DJKN *to distinguished Asset Manager* yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019, maka visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2020-2024 adalah: Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

#### **Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan melalui Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;

4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

### **Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**

Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

### **Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
  - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
  - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
  - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - d. Komunikasi publik yang efektif.

## **B. PENETAPAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja KPKNL Malang Tahun 2022 dijabarkan dalam melalui 10 Sasaran Strategis dan 19 IKU sebagai berikut:

**1 SS : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian**

IKU : Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tercapai sebesar 120,00%

IKU : Persentase produktivitas lelang tercapai sebesar 106,46%

**2 SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**

IKU : Persentase Realisasi Pokok Lelang tercapai sebesar 115,27%

IKU : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara tercapai sebesar 120,00%

**3 SS : Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi**

IKU : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL tercapai sebesar 104,34%

**4 SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**

IKU : Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tercapai sebesar 120,00%

IKU : Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan tercapai sebesar 120,00%

- IKU : Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) tercapai sebesar 120,00%
- IKU : Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tercapai sebesar 120,00%
- 5 SS : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**
- IKU : Deviasi ketergunaan hasil penilaian tercapai sebesar 120,00%
- 6 SS : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**
- IKU : Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction tercapai sebesar 106,66%
- IKU : Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN tercapai sebesar 120,00%
- 7 SS : Edukasi yang Efektif**
- IKU : Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tercapai sebesar 103,52%
- 8 SS : Pengawasan dan pengendalian yang efektif**
- IKU : Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara tercapai sebesar 113,12%
- 9 SS : SDM yang Kompeten**
- IKU : Persentase pengembangan kompetensi pegawai tercapai sebesar 120,00%
- 10 SS : Organisasi yang fit for Purpose**
- IKU : Nilai review pengelolaan kinerja tercapai sebesar 113,98%
- IKU : Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator tercapai sebesar 109,40%
- 11 SS : Pengelolaan Keuangan yang Optimal**
- IKU : Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 100,38%
- IKU : Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaantercapai sebesar 120,00%

**PENGHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)**

**KPKNL MALANG**

**TAHUN 2022**

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket
	Stakeholder Perspective(25%)							28,31%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							113,23%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	121,12%	14%	50%	121,12%	120,00 %	<b>hijau</b>
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	38,32%	14%	50%	106,46 %	106,46 %	<b>hijau</b>
	Customer Perspective(15%)							16,65%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							117,63%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	115,27%	14%	50%	115,27 %	115,27%	<b>hijau</b>
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	668,75%	14%	50%	668,75 %	120,00 %	<b>hijau</b>
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							104,34 %	
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4,61	4,81	21%	100%	104,34 %	104,34 %	<b>hijau</b>

	Internal Process Perspective (30%)							34,20%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							120,00 %	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	86,59%	14%	24%	133,22 %	120,00 %	<b>hijau</b>
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	128,08%	19%	33%	128,08 %	120,00 %	<b>hijau</b>
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	147,00%	14%	24%	147,00 %	120,00 %	<b>hijau</b>
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	120,00%	11%	19%	120,00 %	120,00 %	<b>hijau</b>
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00 %	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	0,00%	14%	100%	200,00 %	120,00 %	<b>hijau</b>
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							113,33%	
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	98,12%	14%	50%	106,66 %	106,66 %	<b>hijau</b>
6b-N	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	10%	0,00%	14%	50%	200,00 %	120,00 %	<b>hijau</b>
7	Edukasi yang Efektif							103,52 %	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	92,00	95,24	14%	100%	103,52 %	103,52 %	<b>hijau</b>
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							113,12%	

8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	96,15%	14%	100%	113,12%	113,12%	<b>hijau</b>
Learning & Growth Perspective (30%)								33,85%	
9	SDM yang Kompeten							120,00 %	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00 %	120,00 %	<b>hijau</b>
10	Organisasi yang Fit For Purpose							111,69%	
10a-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	91,18	14%	50%	113,98 %	113,98%	<b>hijau</b>
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	98,46	14%	50%	109,40 %	109,40 %	<b>hijau</b>
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							110,19%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,86%	14%	50%	100,38 %	100,38 %	<b>hijau</b>
11b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	159,67%	14%	50%	159,67 %	120,00 %	<b>hijau</b>
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>113,00 %</b>	<b>hijau</b>

Dalam kontrak kinerja tersebut di atas berisi Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), target IKU Tahun 2022 dan realisasi capaian IKU Tahun 2022. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah turunan dari SS, yang merupakan indikator tercapai/ tidaknya SS tersebut. Pencapaian realisasi IKU dengan status hijau atau  $\geq 100\%$  dari target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK) mengindikasikan keberhasilan pencapaian suatu Sasaran Strategis.

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Tahun 2022, KPKNL Malang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/MK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

## BAB III | Akuntabilitas Kinerja



- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia

## BAB III | Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang adalah perwujudan kewajiban dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Pada bab ini dikemukakan rencana dan realisasi dari setiap kegiatan dan sasaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, capaian kinerja, beserta analisisnya.

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Ikhtisar capaian kinerja organisasi terdapat dalam IKU Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### PENGHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)

KPKNL MALANG

TAHUN 2022

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket
	Stakeholder Perspective(25%)							28,31%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							113,23%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	121,12%	14%	50%	121,12%	120,00 %	<b>hijau</b>
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	38,32%	14%	50%	106,46 %	106,46 %	<b>hijau</b>
	Customer Perspective(15%)							16,65%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi							117,63%	

	Harapan Pengguna Jasa								
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	115,27%	14%	50%	115,27 %	115,27%	<b>hijau</b>
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	668,75%	14%	50%	668,75 %	120,00 %	<b>hijau</b>
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							104,34 %	
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4,61	4,81	21%	100%	104,34 %	104,34 %	<b>hijau</b>
	Internal Process Perspective (30%)							34,20%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							120,00 %	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	86,59%	14%	24%	133,22 %	120,00 %	<b>hijau</b>
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	128,08%	19%	33%	128,08 %	120,00 %	<b>hijau</b>
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	147,00%	14%	24%	147,00 %	120,00 %	<b>hijau</b>
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	120,00%	11%	19%	120,00 %	120,00 %	<b>hijau</b>
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00 %	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	0,00%	14%	100%	200,00 %	120,00 %	<b>hijau</b>
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							113,33%	
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-	P/M	92%	98,12%	14%	50%	106,66 %	106,66 %	<b>hijau</b>

	auction dan e-conventional auction								
6b-N	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	P/M	10%	0,00%	14%	50%	200,00 %	120,00 %	<b>hijau</b>
7	Edukasi yang Efektif							103,52 %	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	92,00	95,24	14%	100%	103,52 %	103,52 %	<b>hijau</b>
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							113,12%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	96,15%	14%	100%	113,12%	113,12%	<b>hijau</b>
	Learning & Growth Perspective (30%)							33,85%	
9	SDM yang Kompeten							120,00 %	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00 %	120,00 %	<b>hijau</b>
10	Organisasi yang Fit For Purpose							111,69%	
10a-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	91,18	14%	50%	113,98 %	113,98%	<b>hijau</b>
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	98,46	14%	50%	109,40 %	109,40 %	<b>hijau</b>
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							110,19%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,86%	14%	50%	100,38 %	100,38 %	<b>hijau</b>
11b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	159,67%	14%	50%	159,67 %	120,00 %	<b>hijau</b>
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>113,00 %</b>	<b>hijau</b>

## B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Terdapat 19 (sembilan belas) jenis Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Tahun 2022 sebagaimana tergambar dalam tabel di atas. Semua Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Tahun 2022 telah memenuhi target dengan status HIJAU atau tingkat pencapaian target lebih dari 100%.

Berikut ini kami sajikan analisis dan evaluasi atas pencapaian target setiap IKU dalam Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang sebagai berikut:

### 1. Sasaran Strategis (SS) 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							113,23%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	121,12%	14%	50%	121,12%	120,00%	<b>hijau</b>
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	38,32%	14%	50%	106,46%	106,46%	<b>hijau</b>

Sasaran Strategis (SS) peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

#### Indikator Kinerja Utama (IKU) 1

##### 1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							113,23%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	121,12%	14%	50%	121,12%	120,00%	<b>hijau</b>

Nilai Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2022 adalah 120,00% dengan status capaian HIJAU.

Secara keseluruhan, capaian atas IKU Persentase manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2022 telah mencapai hasil yang optimal dengan capaian sebesar 120% yakni Rp31.100.158.536,-.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target antara lain:

- a. Penggalian potensi PNBPN dari penjualan barang rampasan dengan mengumpulkan seluruh Kasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri se-Wilker KPKNL Malang sebagai Pengelola barang rampasan kejaksaan
- b. Penggalian potensi PNBPN dari pengelolaan aset Satker Badan Layanan Umum (BLU)
- c. Penggalian potensi PNBPN dari pengelolaan aset Satker-Satker besar di wilayah Kab. Malang
- d. Berkoordinasi dengan Seksi Pelayanan Penilaian agar segera menindaklanjuti permohonan penilaian dari Seksi PKN.
- e. Berkoordinasi dengan Satker agar segera menindaklanjuti persetujuan sewa dan penjualan BMN.
- f. Mendorong Satker agar segera mencari calon penyewa baru dan mengajukan permohonan sewa
- g. Memonitor secara intensif tindak lanjut persetujuan penjualan yang telah diajukan lelang.
- h. Untuk menutup target biad, KPKNL Malang menggali potensi dari BKPN yang masuk dalam kriteria crash program yaitu dari BKPN Penyerahan Universitas Negeri Malang
- i. Berkoordinasi dengan pemohon lelang untuk lebih memprioritaskan permohonan yang berpotensi laku.
- j. Berkoordinasi dengan pemohon lelang dan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Malang untuk menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan SKPT online
- k. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan lelang.
- l. Melaksanakan sosialisasi terkait permohonan lelang sukarela dan lelang rampasan kejaksaan.

## Indikator Kinerja Utama (IKU) 2

### 1b-CP Persentase Produktivitas Lelang

1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							113,23%	
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	38,32%	14%	50%	106,46%	106,46%	hijau

Realisasi presentase produktivitas lelang pada tahun 2022 adalah sebesar 38,32% dari target yang ditetapkan sebesar 36%, sehingga capaiannya sebesar 106,46% dengan status capaian **HIJAU**.

Hasil tersebut diperoleh dari rincian frekuensi lelang laku sebanyak 622 lot dari total 1.623 lot lelang di tahun 2022. Adapun formulasi Persentase produktivitas lelang terdapat perbedaan antara tahun 2022 dengan tahun 2021. Pada tahun 2022 dihitung berdasarkan jumlah lot lelang, sedangkan tahun 2021 dihitung berdasarkan jumlah frekuensi lelang.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Melakukan penggalian potensi lelang kepada stakeholders agar lebih mendahulukan permohonan lelang yang berpotensi laku.
- b. Koordinasi secara aktif dengan pemohon lelang terkait kelengkapan dokumen lelang.
- c. Membantu mempromosikan produk lelang melalui media sosial.

KPKNL Malang berpartisipasi nyata mendukung program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi Covid 19 dengan mengikuti Kompetisi dan Inovasi (Kedai) Lelang UMKM tahun 2021. Kegiatan ini melibatkan pelaku UMKM di wilayah kerja KPKNL Malang. Hasil dari pelaksanaan Kedai Lelang UMKM Tahun 2021 turut berkontribusi meningkatkan produktitas lelang. KPKNL Malang meraih Juara 3 (ketiga) pada Kompetisi dan Inovasi (Kedai) Lelang UMKM tahun 2021 yang berkelanjutan sampai tahun 2022. Dan untuk Kedai Lelang UMKM Tahun 2022 sendiri KPKNL Malang dapat berpartisipasi sampai pada babak Semifinal.

## 2. Sasaran Strategis (SS) 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							117,63%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	115,27%	14%	50%	115,27%	115,27%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	668,75%	14%	50%	668,75%	120,00%	hijau

Sasaran Strategis (SS) untuk Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

### Indikator Kinerja Utama (IKU) 3

#### 2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							117,63%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	115,27%	14%	50%	115,27%	115,27%	hijau

Realisasi Persentase Realisasi Pokok Lelang tercapai sebesar 115,27% atau sebesar Rp Rp320.441.713.899 dari target Rp278.000.000. capaian tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Adapun capaian tahun 2022 adalah sebesar Rp319.087.178.479,.

Hal-hal yang mendukung kenaikan capaian ini tentunya tidak lepas dari penerapan strategi, diantaranya:

- Berkoordinasi untuk penggalan potensi lelang dengan pemohon lelang untuk lebih memprioritaskan permohonan yang berpotensi laku.
- Berkoordinasi dengan pemohon lelang dan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL malang untuk menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan SKPT online.
- Melaksanakan koordinasi terkait lelang sukarela dan lelang barang rampasan.

## Indikator Kinerja Utama (IKU) 4

### 2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							117,63%	
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	668,75%	14%	50%	668,75%	120,00%	hijau

Realisasi Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara pada tahun 2022 yakni sebesar 668,75%(Rp Rp13.375.009.670) dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 668,75%. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara tahun 2022 **meningkat** dibandingkan dengan Tahun 2021. Jumlah Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 306,13% (Rp Rp4.285.866.145,-) dari target sebesar 100%.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- Melaksanakan pengembalian sebanyak 20 BKPN penyerahan dari Universitas Negeri Malang sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.
- Melaksanakan updating data di aplikasi focus pn terhadap berkas eks perbankan yang sudah dikembalikan namun datanya belum di hapus di focus-pn.

### 3. Sasaran Strategis (SS) 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							104,34%	
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4,61	4,81	21%	100%	104,34%	104,34%	hijau

Sasaran Strategis (SS) untuk kepuasan pengguna layanan yang tinggi mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

## Indikator Kinerja Utama (IKU) 5

### 3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							104,34%	
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4,61	4,81	21%	100%	104,34%	104,34%	hijau

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (quick win). Survei dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun 2022 mencapai 4,81 dari target tahun sebesar 4,60. Sehingga persentase capaian kinerja sebesar 104,34% dengan status capaian **HIJAU**.

Indeks kepuasan pengguna layanan Tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan Indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun 2021, dimana pada tahun tersebut realisasinya sebesar 4,71.

Capaian IKU dapat melebihi target, didukung oleh beberapa faktor:

- a. Adanya kampanye terus-menerus terkait anti korupsi dan no gratifikasi;
- b. Penyediaan layanan pengaduan yang dapat diakses 24 jam;
- c. Perbaikan sarana dan prasarana pendukung fasilitas kantor sehingga dapat meningkatkan kenyamanan stakeholder;
- d. Upaya peningkatan pemahaman *Person In Charge* atas layanan yang akan diberikan kepada stakeholder melalui berbagai pelatihan dan pengembangan diri;
- e. Menyelesaikan layanan dengan tepat waktu;
- f. Melaksanakan proses pelayanan sesuai prosedur dan dengan sikap yang baik;
- g. Memberikan pemahaman terkait alur proses dan norma waktu pelayanan.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2022 adalah melakukan perbaikan pada aspek penting yang menjadi prioritas perbaikan layanan yaitu kesesuaian prosedur dan waktu penyelesaian layanan.

#### 4. Sasaran Strategis (SS) 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							120,00%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	86,59%	14%	24%	133,22%	120,00%	<b>hijau</b>
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	128,08%	19%	33%	128,08%	120,00%	<b>hijau</b>
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	147,00%	14%	24%	147,00%	120,00%	<b>hijau</b>
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	120,00%	11%	19%	120,00%	120,00%	<b>hijau</b>

Sasaran Strategis (SS) untuk Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

### Indikator Kinerja Utama (IKU) 6

#### 4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							120,00%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	86,59%	14%	24%	133,22%	120,00%	<b>hijau</b>

Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditujukan untuk memastikan Barang Milik Negara (BMN) dikelola dan terutilisasi dengan optimal sesuai dengan potensi tertinggi dan terbaiknya (highest and best use). Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas ideal yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan. Objek tingkat kesesuaian penggunaan BMN tahun 2022 adalah Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Negara/Mess/Asrama/ Bungalow pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

Realisasi persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2022 adalah sebesar 86,59% dari target yang ditetapkan sebesar 65%. Berdasarkan realisasi dimaksud diperoleh indeks tanpa batas capaian IKU yaitu sebesar 133,22%. Secara keseluruhan capaian atas IKU Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021, dimana capaiannya Tahun 2021 adalah sebesar 84,44%.

Keberhasilan kenaikan capaian target ini diperoleh berkat upaya maksimal dari tim dalam menerapkan strategi pelaksanaan pengukuran tingkat kesesuaian SBSK tahun 2022, yaitu:

- a. Review bersama antara KPKNL Malang cq. Seksi PKN dengan Kanwil DJKN Jawa Timur dalam evaluasi dan verifikasi hasil perhitungan SBSK KPKNL agar diakui Kantor Pusat.
- b. Mengedukasi satuan kerja terkait optimalisasi penggunaan BMN target SBSK sehingga dapat meningkatkan skor SBSK.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada periode berikutnya yaitu tahun 2023 antara lain:

- a. Mengedukasi kepada satker target terkait urgensi dan prosedur pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK (PMK 172 Th 2020) dan PMK No.207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang berkorelasi positif dengan hasil/skor SBSK.
- b. Koordinasi intensif dengan Kanwil DJKN Jawa Timur Selaku Pembina KPKNL Malang dalam rangka evaluasi hasil penghitungan SBSK.

- c. Melaksanakan percepatan penyelesaian SBSK pada satker target.

### Indikator Kinerja Utama (IKU) 7

#### 4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan

4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							120,00%	
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	P/L	100%	128,08%	19%	33%	128,08%	120,00%	<b>hijau</b>

Jumlah persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan pada tahun 2022 sebesar 666 bidang tanah sesuai dengan target tahun 2022 sebesar 520 bidang tanah. Berdasarkan realisasi dimaksud diperoleh indeks tanpa batas capaian IKU yaitu sebesar 128,08% dengan status capaian **HIJAU**.

Persentase capaian persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 100%. Target yang sama nilainya dengan capaian mengindikasikan bahwa kegiatan verifikasi bidang tanah target berupa pengusulan daftar indikatif dan nominatif pensertipikatan yang merupakan salah satu langkah pra sertifikasi sangat rigid dan seksama.

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat;
- Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik;
- Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan oleh Kementerian/Lembaga;
- melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan;
- Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada Kementerian ATR/BPN cq. Kantor Pertanahan setempat untuk disertipikatkan;
- Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2022 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN dimana output yang dihasilkan adalah sertipikat.

## Indikator Kinerja Utama (IKU) 8

### 4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							120,00%	
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	147,00%	14%	24%	147,00%	120,00%	hijau

Realisasi presentase efektivitas penyelesaian BKPN pada tahun 2022 sebesar 147,00% (294 BKPN) dari target sebesar 100% (200 BKPN). Sehingga capaian presentase efektivitas penyelesaian BKPN pada tahun 2022 adalah sebesar 120% dengan status capaian **HIJAU**.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target antara lain:

- Melaksanakan penagihan langsung;
- Melaksanakan joint collection dengan KPPBC TMC Malang dan KPP Madya Malang dalam rangka penagihan (debitur a.n. Sujanto Harsono / PT. Usaha Loka) untuk segera menyelesaikan hutangnya;
- Melaksanakan penagihan dan pemberitahuan Crash Program (Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah yang Diurus / Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2022) kepada Debitur;
- Melaksanakan peningkatan tahap pengurusan piutang Negara.

KPKNL Malang menerima penghargaan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai Juara 3 dalam pelaksanaan *Crash Program* Keringanan Utang Tahun 2022 dengan Kategori *Crash Program Award* 2022.

## Indikator Kinerja Utama (IKU) 9

### 4d-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							120,00%	
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	120,00%	11%	19%	120,00%	120,00%	hijau

Capaian presentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada tahun 2022 yakni sebesar 120,00% (60 NUP) dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% (50 NUP) dengan status capaian **HIJAU**.

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator, yaitu kepentingan umum (Objek Kepentingan Umum, Rahasia Negara, Alutsista), manfaat sosial (Indikator yang sudah diterima secara Internasional), kepuasan pengguna (*Reliability*,

*Responsiveness, Assurance, Performance, Features, Aesthetics, Durability, Serviceability, Quality*), potensi penggunaan masa mendatang (Penggunaan masa depan dengan kategori & signifikansi aset), kelayakan finansial (Manfaat ekonomi/ Perbedaan antara komersial & non komersial aset) dan kondisi teknis (Baik, rusak ringan & rusak berat sesuai PMK 181). Evaluasi kinerja BMN dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Dalam rangka melakukan evaluasi kinerja BMN, maka diperlukan data/informasi dari Pengguna Barang terkait aset yang akan dievaluasi dan survei data sewa aset sejenis di sekitar lokasi aset.

Kegiatan evaluasi kinerja BMN yang diformulasikan dalam IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KM.06/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara dan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-3/KN/2019 tentang Tahap Implementasi dan Mekanisme Perhitungan Nilai Indikator dan Prosedur Teknis Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Barang Milik Negara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penyelesaian profil NUP Aset, yakni:

- a. Memanfaatkan data yang diperoleh dari survey lapangan dan menyesuaikan sesuai dengan aplikasi dengan cara survei secara daring dengan satker objek;
- b. Berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Kanwil dan Kantor Pusat;
- c. Melaksanakan survey dan pelaporan Ekin sesuai dengan timeline dan dilaksanakan bertahap.

#### 5. Sasaran Strategis (SS) 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	0,00%	14%	100%	200,00%	120,00%	<b>hijau</b>

Sasaran Strategis (SS) untuk Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

#### Indikator Kinerja Utama (IKU) 10

##### 5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	0,00%	14%	100%	200,00%	120,00%	<b>hijau</b>

Realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah 0,00% dari target yang ditetapkan maksimal sebesar 19%, sehingga capaiannya adalah sebesar 200% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% (50 NUP) dengan status capaian HIJAU.

Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian tersebut dihitung dari 108 Laporan Penilaian dengan Obyek Penilaian khususnya berupa Barang Milik Negara. Secara keseluruhan capaian atas IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021, dimana capaian Tahun 2021 adalah sebesar 199,82%.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- Melakukan Survei Lapangan Penilaian untuk semua objek yang berupa tanah dan bangunan;
- Untuk objek selain tanah dan/atau bangunan, Seksi Pelayanan Penilaian berkoordinasi dengan Seksi PKN sehingga objek yang dimohonkan penilaian oleh Seksi PKN adalah barang yang nilai usulannya masih rendah atau belum mencerminkan nilai wajar;
- Edukasi oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara kepada satuan kerja selain terkait pengelolaan kekayaan negara termasuk pula edukasi terkait penentuan nilai indikasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN dengan melibatkan fungsional Penilai Pemerintah pada KPKNL Malang;
- Memfilter dan mengklasifikasi data pembanding untuk membentuk nilai wajar yang akuntabel.

## 6. Sasaran Strategis (SS) 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							113,33%	
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	98,12%	14%	50%	106,66%	106,66%	hijau
6b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	10%	0,00%	14%	50%	200,00%	120,00%	hijau

Sasaran Strategis (SS) untuk Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

### Indikator Kinerja Utama (IKU) 11

#### 6a-N Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction

6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							113,33%	
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	98,12%	14%	50%	106,66%	106,66%	hijau

Realisasi pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction tahun 2022 adalah sebesar 98,12% dari target yang telah ditetapkan sebesar 92%, sehingga capaiannya adalah 106,66% dengan status capaian **HIJAU**.

Realisasi capaian ini dapat dicapai karena pelaksanaan lelang selama tahun 2023 seluruhnya sudah melalui aplikasi lelang.go.id kecuali lelang kayu PT. Perhutani sebanyak 18 frekuensi. Selain itu Para Jafung Pelelang Melakukan sosialisasi, koordinasi, bimtek, dan/atau penggalan potensi lelang kepada *stakeholders*/pemohon lelang untuk mengajukan lelang secara online melalui aplikasi lelang.go.id.

## Indikator Kinerja Utama (IKU) 12

### 6b-N Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							113,33%	
6b-N	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	10%	0,00%	14%	50%	200,00%	120,00%	hijau

Realisasi Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN tahun 2022 adalah sebesar 0% dari target yang telah ditetapkan sebesar 12,50%, sehingga capaiannya adalah 200% dengan status capaian **HIJAU**.

Deviasi penerimaan negara merupakan selisih yang terdiri dari:

- pencatatan biaya administrasi piutang negara di aplikasi Focus PN dan pencatatan penyetoran biaya administrasi di kas negara melalui Online Monitoring SPAN (OmSPAN);
- pencatatan bea lelang PL I yang meliputi bea lelang penjual, bea lelang pembeli dan bea lelang batal dan bea permohonan lelang, dan jasa lainnya (uang jaminan pembeli wanprestasi dan biaya penggantian kutipan Risalah Lelang) pada Dropbox lelang dengan pencatatan penyetoran bea lelang di kas negara melalui Online Monitoring SPAN (OmSPAN);
- pencatatan bea lelang Pegadaian pada Modul Pegadaian dengan pencatatan penyetoran bea lelang di kas negara melalui Online Monitoring SPAN (OmSPAN).

Kategori selisih adalah terdapat perbedaan jumlah biaya administrasi, sehingga adanya perbedaan waktu ke kas negara dengan pencatatan di aplikasi Focus PN selama dapat dijelaskan, tidak dikategorikan sebagai selisih.

Strategi yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN agar tidak ada selisih pencatatan biaya administrasi Piutang Negara dan Bea Lelang sebagai berikut:

- Pencatatan real time di aplikasi FocusPN;
- Rekonsiliasi mingguan antara Seksi Hukum dan Informasi dengan seksi Piutang Negara guna memastikan validitas pencatatan;
- Rekonsiliasi Internal yang dilakukan bendahara penerimaan antara data rekening penampungan dengan data OmSPAN;
- Update data transaksi yang terjadi pada aplikasi OM-SPAN diinput ke Dropbox;
- Monitoring pelaksanaan lelang ke dalam aplikasi Dropbox.

## 7. Sasaran Strategis (SS) 7: Edukasi yang Efektif

7	Edukasi yang Efektif							103,52%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	92,00	95,24	14%	100%	103,52%	103,52%	<b>hijau</b>

Sasaran Strategis (SS) Edukasi yang Efektif berhasil memperoleh status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

### Indikator Kinerja Utama (IKU) 13

#### 7a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

7	Edukasi yang Efektif							103,52%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	92,00	95,24	14%	100%	103,52%	103,52%	<b>hijau</b>

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2022 sebesar 95,24 dari target sebesar 92. Sehingga persentase capaian kinerja sebesar 103,52% dengan status capaian **HIJAU**.

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan capaian 93,53 dari target tahun 2021 sebesar 92 dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,66%. Adapun nilai edukasi dan komunikasi pada Tahun 2022 rata-rata 94,60 yang diperoleh dari Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara sebesar 95,60, Seksi Piutang Negara sebesar 96,20, dan Seksi Pelayanan Lelang sebesar 95,80.

## 8. Sasaran Strategis (SS) 8: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							113,12%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	96,15%	14%	100%	113,12%	113,12%	<b>hijau</b>

Sasaran Strategis (SS) untuk Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

## Indikator Kinerja Utama (IKU) 14

### 8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							113,12%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	96,15%	14%	100%	113,12%	113,12%	<b>hijau</b>

Persentase Tindak Lanjut persetujuan Pengelolaan kekayaan negara yang dicapai pada tahun 2022 sebanyak 96,15% dengan target tahun 2022 sebesar 85%, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 113,12% dengan status capaian **HIJAU**. Capaian tahun 2022 **menurun** dibandingkan dengan tahun 2021 yang capaiannya sebesar 97,20% dari target tahun 2021 sebesar 85%.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- Mengedukasi satuan kerja terkait PMK Nomor 207/PMK.06/2021 yang menggantikan PMK 244/PMK.06/2014 dan PMK 52/PMK.06/2016 dan menyampaikan agar satker tetap menyampaikan tembusan laporan wasdal kepada KPKNL;
- Berkoordinasi dengan satuan kerja baik secara formal dan informal untuk memantau persetujuan sewa dan penjualan yang belum ditindaklanjuti.
- Berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Jawa Timur sebagai pembina KPKNL Malang untuk memperoleh data dari Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan PNPB yang telah disetor oleh penyewa atau pembeli lelang BMN.

## 9. Sasaran Strategis (SS) 9: SDM yang Kompeten

9	SDM yang Kompeten							120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	<b>hijau</b>

Sasaran Strategis (SS) untuk organisasi yang *fit for purpose* mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

## Indikator Kinerja Utama (IKU) 15

### 9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

9	SDM yang Kompeten							120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	<b>hijau</b>

Capaian IKU presentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2022 adalah sebesar 120% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120% dengan status capaian **HIJAU**. Capaian IKU presentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2021 tetap dibandingkan Tahun 2021 dengan capaian sebesar 120% dari Target 100%. hal ini disebabkan karena kesadaran masing-masing pegawai untuk terus mengembangkan kemampuannya sangatlah tinggi. Strategi yang dilakukan adalah dengan secara rutin menginformasikan pengumuman diklat dan mendorong seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Malang untuk mengikuti diklat pengembangan kompetensi.

#### 10. Sasaran Strategis (SS) 10: Organisasi yang *Fit for Purpose*

10	Organisasi yang Fit For Purpose							111,69%	
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM (target sesuai status, pilih salah satu)	P/M	0	0,00	14%	33%	#DIV/0!		<b>hijau</b>
10a-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	91,18	14%	50%	113,98%	113,98%	<b>hijau</b>
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	98,46	14%	50%	109,40%	109,40%	<b>hijau</b>

Sasaran Strategis (SS) untuk Pengelolaan Keuangan yang Optimal mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

#### Indikator Kinerja Utama (IKU) 16

##### 10a-N Nilai Review Pengelolaan Kinerja

10	Organisasi yang Fit For Purpose							111,69%	
10a-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	91,18	14%	50%	113,98%	113,98%	<b>hijau</b>

Nilai hasil review pengelolaan kinerja yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 91.18 dari target pada tahun 2022 sebesar 80. sehingga diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 113,98% dengan status capaian HIJAU.

Capaian Nilai hasil review pengelolaan kinerja pada tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 dengan capaian 90.92 dari target tahun 2021 sebesar 75, dengan persentase capaian kinerja sebesar 120,00%, hal ini tercapai dikarenakan dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja telah dilakukan dengan baik, meliputi perencanaan kinerja,

pelaksanaan atau eksekusi kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan intensitas edukasi kinerja yang dilaksanakan rutin untuk mengetahui permasalahan dan solusinya.

### Indikator Kinerja Utama (IKU) 17

#### 10b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

10	Organisasi yang Fit For Purpose							111,69%	
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	98,46	14%	50%	109,40%	109,40%	hijau

Realisasi indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator pada Tahun 2022 adalah sebesar 98.86 (nilai rata-rata dari Triwulan I sebesar 97.61, Triwulan II sebesar 98.31, Triwulan III sebesar 98.01, dan Triwulan IV sebesar 99.81) dari target yang telah ditetapkan sebesar 90 sehingga persentase capaian kinerja adalah 109,40% dengan status capaian HIJAU.

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada setiap triwulan oleh Pejabat Administrator dengan materi sesuai yang disampaikan oleh CTO – Sekretariat Jenderal dan disampaikan kembali dengan tepat waktu yang dinilai berdasarkan hasil survei yang diberikan kepada seluruh pejabat dan pegawai KPKNL Malang.

Strategi yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Administrator untuk pencapaian IKU indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator yang dikoordinir oleh Setjen (CTO) dengan memperhatikan beberapa parameter sebagai berikut:

- Kecepatan, bahwa materi FGD telah disampaikan kepada pegawai, 1 hari setelah pelaksanaan Pra-FGD;
- Feedback peserta yang terdiri dari content (topik materi dan pesan yang disampaikan), delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator, dan contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).

### 11. Sasaran Strategis (SS) 11: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							110,19%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,86%	14%	50%	100,38%	100,38%	hijau
11b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	159,67%	14%	50%	159,67%	120,00%	hijau

## Indikator Kinerja Utama (IKU) 18

### 11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							110,19%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,86%	14%	50%	100,38%	100,38%	<b>hijau</b>

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 95,86% dari target pada tahun 2022 sebesar 95,5% sehingga diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 100,38% dengan status capaian **HIJAU**.

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) dalam SE-8/MK.1/2020 pada Triwulan IV menggunakan perhitungan secara komposit dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 40% dan Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART) sebesar 60%. Untuk Perhitungan IKU PKPA mengandalkan aplikasi OMSPAN - MonevPA untuk melihat 8 (delapan) indikator hasil IKPA dan aplikasi SMART Kemenkeu untuk melihat Nilai Kinerja Anggaran.

Nilai IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	NILAI IKPA	100		
1	Revisi DIPA	100%	10	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	100%	10	10
3	Penyerapan Anggaran	100%	20	20
4	Belanja Kontraktual	100%	0	0
5	Penyelesaian Tagihan	100%	0	0
6	Pengelolaan UP dan TUP	100%	10	10
7	Dispensasi SPM	100%	5	5
8	Capaian Output	100%	25	25

Capaian nilai SMART DJA KPKNL Malang adalah sebagai berikut:

Indikator	Bobot	Capaian Indikator	Capaian Tertimbang
Capaian Rincian Output	43,50%	100,00%	43,50
Nilai Efisiensi	28,60%	79,36%	22,70
Konsistensi Penyerapan Anggaran	18,20%	99,27%	18,07
Penyerapan Anggaran	9,70%	91,19%	8,85
<b>CAPAIAN SMART DJA</b>			<b>93,11</b>

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Indikator	Bobot	Nilai	Capaian Tertimbang
IKPA	40,00%	100	40%
SMART DJA	60,00%	93,11	55,86%
<b>CAPAIAN SMART DJA</b>			<b>95,86%</b>

Nilai IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran selama 3 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

IKU	Tahun	Target Tahunan	Realisasi	%
Pelaksanaan anggaran yang optimal				
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	<b>2020</b>	<b>95%</b>	<b>99,45%</b>	<b>104,68%</b>
	<b>2021</b>	<b>95,5%</b>	<b>95,15%</b>	<b>99,63%</b>
	<b>2022</b>	<b>95,5%</b>	<b>95,86%</b>	<b>100,38%</b>

Adapun capaian tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun 2021 karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran melalui Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART) (dahulu bernama SMART-DJA) yang sudah mengimplementasikan secara penuh perhitungan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP) pada Tahun Anggaran 2022 dengan empat Indikator yaitu Capaian Output, Konsistensi, Penyerapan Anggaran dan Efisiensi, dimana perolehan KPKNL Malang mencapai nilai 93,11.
- b. Monitoring Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran melalui aplikasi OMSPAN - MonevPA yang semula berjumlah melalui 13 (tiga belas) indikator menjadi 8 (delapan) indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Capaian Output dimana perolehan KPKNL Malang mencapai nilai 100.
- c. Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) dalam SE-8/MK.1/2020 pada Triwulan IV menggunakan perhitungan secara komposit dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 40% dan Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART) sebesar 60%. Untuk Perhitungan IKU PKPA mengandalkan aplikasi OMSPAN - MonevPA untuk melihat 8 (delapan) indikator hasil IKPA dan aplikasi SMART Kemenkeu untuk melihat Nilai Kinerja Anggaran. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut nilai IKU PKPA KPKNL Malang adalah sebesar 95,86%.

#### Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kinerja PNBP pada KPKNL Malang TA 2022 jika dibandingkan dengan TA 2021 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1.	PNBP Aset	20.091.217.979	22.034.106.253
2.	PNBP Piutang Negara	219.443.068	160.522.654
3.	PNBP Lelang	10.789.497.489	9.153.187.449

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU) 19**

##### **11b-CP Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan**

11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							110,19%	
11b-CP	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	P/M	100%	159,67%	14%	50%	159,67%	120,00%	hijau

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 159,67% dari target pada tahun 2022 sebesar 100% sehingga diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 159,67% dengan status capaian HIJAU.



# BAB IV | Penutup



## A. Permasalahan dan Kendala

## B. Strategi Pemecahan Untuk Tahun 2023

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia



## **BAB IV** | Penutup

Laporan Kinerja KPKNL Malang Tahun 2022 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN c.q. KPKNL Malang serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis DJKN tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, PeLaporan Kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan KPKNL Malang tergambar dalam pencapaian target IKU dengan status capaian **HIJAU**:

1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
2. Persentase produktivitas lelang
3. Persentase Realisasi Pokok Lelang
4. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
5. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL
6. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
7. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan
8. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
9. Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)
10. Deviasi ketergunaan hasil penilaian
11. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction
12. Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN
13. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
14. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara
15. Persentase pengembangan kompetensi pegawai
16. Nilai review pengelolaan kinerja
17. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
18. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
19. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

### **A. PERMASALAHAN DAN KENDALA**

Secara umum pencapaian tahun 2022 sudah di atas target yang ditetapkan. Pencapaian IKU KPKNL Malang, dengan nilai kinerja organisasi sebesar 113,00% dengan capaian HIJAU terdiri dari 11 Sasaran Strategis dan 20 IKU. Meskipun keseluruhan IKU yang berjumlah 20 sudah memperoleh capaian hijau masih terdapat beberapa permasalahan yang mungkin mempengaruhi capaian IKU tahun berikutnya, antara lain permasalahan terkait IKU Persentase realisasi pokok lelang yaitu permasalahan banyaknya permohonan lelang Eksekusi yang tidak laku (TAP) yang disebabkan oleh nilai limit yang ditetapkan terlalu tinggi, adanya permasalahan hukum, objek lelang tidak marketable.

## **B. STRATEGI PEMECAHAN UNTUK TAHUN 2023**

Sehubungan dengan permasalahan dan kendala yang terjadi di tahun 2022 tersebut, maka di tahun 2023 diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Dari permasalahan dan kendala pada KPKNL Malang tersebut, rencananya akan dilakukan upaya yaitu dengan cara mendorong pemohon lelang agar mendahulukan permohonan lelang yang mempunyai potensi laku sehingga dapat mengurangi potensi lelang yang tidak laku (TAP).

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 202 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang dimaksudkan sebagai arahan untuk mengembangkan pengukuran terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPKNL Malang tahun 2022 diharapkan KPKNL Malang semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dengan visi dan misi dapat dicapai. Selain itu juga diharapkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi sehingga untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.

